

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah contoh dari beberapa sistem pemerintahan yang digunakan di berbagai negara, pada sistem ini semua keputusan berada di tangan rakyat, dimana kelangsungan hidup rakyat itu bergantung pada keputusan yang telah diambil (Harianto & Rafni, 2019). Di Indonesia sistem politik demokrasi sangat banggakan karena sistem politik ini memberikan penghargaan yang tinggi kepada masyarakatnya. Masyarakat diberikan kebebasan dalam berpendapat maupun berekspresi. Berbicara tentang demokrasi pasti tidak lepas dari yang namanya politik. Politik sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sebuah negara yang demokratis (Lestari & Arumsari, 2018). Namun hanya sebagian warga negara saja yang ikut berpartisipasi dalam proses politik. Contohnya di negara yang masyarakatnya masih masuk dalam kategori tradisional yang bergantung pada elit-elit politik, sehingga peran warga dalam menentukan keputusan dan mempengaruhi kehidupan negara sangatlah rendah. Sebaliknya, pada negara yang sistem politiknya cenderung sudah modern, kesadaran warga dalam berpartisipasi terhadap politik lebih tinggi. Seluruh anggota masyarakat harus ikut andil dalam merumuskan serta menentukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga keinginan serta harapan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu dari perwujudan demokrasi adalah Pemilu. Pemilu merupakan suatu kegiatan untuk menentukan seseorang guna mengisi sebuah jabatan di Parlemen. Tujuan dari diadakannya pemilu di Indoneisa tidak lain untuk menentukan pemimpin disuatu wilayah dan juga untuk menentukan anggota Legislatif. Pemilu sebagai salah satu bentuk sarana demokrasi masyarakat dalam berpartisipasi politik. Partisipasi politik merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan warga negara agar seluruh kebijakan pemerintah yang bersangkutan dengan rakyat dapat disesuaikan dengan kepentingan rakyat (Wardhani, 2018). Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan unsur vital di suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, karena berpartisipasi dalam politik sangat mempengaruhi legitimasi masyarakat pada perjalanan pemerintahan (Liando, 2016)

Memberikan hak suara ketika Pemilu merupakan bagian dari partisipasi dalam politik. Memberikan hak suara biasa disebut dengan perilaku memilih. Perilaku memilih adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengambil keputusan dalam memberikan hak suara yang akan menentukan hasil pemilu dan menunjukkan kesetiaan terhadap partai (Houghton, n.d.). Menurut (Febriani & Ludi, 2018) Perilaku memilih adalah kuasa seseorang atas dirinya untuk menentukan pilihan politik sesuai dengan keyakinan hati sehingga dapat memberikan hak suara ketika pemilu.

Berkaitan dengan pemilu, menyalurkan hak pilih tentu saja harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia yang telah memiliki kesempatan tidak terkecuali para pemilih pemula. Pemilih pemula di bidang politik merupakan golongan yang menggunakan kesempatan memilih untuk pertama kalinya dalam pemilu. Kalangan pemilih pemula memiliki antusias yang tinggi untuk menyalurkan hak pilihnya ke TPS, karena penggunaan hak pilih tersebut merupakan kesempatan pertama dan mereka tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut (Wardhani, 2018). Kalangan pemilih pemula rata-rata berusia 17 – 21 tahun tergantung kapan pemilu itu dilaksanakan. Pada Pilpres 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat terdapat ±20 juta jiwa pemilih pemula yang masuk dalam daftar penduduk pemilih potensial pemilu (Wiwoho, 2014). Pemilih pemula cukup berpengaruh terhadap suara yang didapatkan. Sehingga tidak heran kalau suara pemilih pemula diperebutkan oleh kandidat untuk mendapat dukungan pada saat Pemilu. Karena jumlah pemilih pemula memiliki pengaruh cukup signifikan untuk menentukan kandidat yang menang pada saat Pemilu. Ketika Pemilu berlangsung tidak sedikit warga masyarakat yang memilih untuk golput. Golput merupakan suatu tindakan tidak memberikan hak suaranya ketika Pemilu. Ada berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat memilih untuk golput, mulai dari sibuk, menganggap tidak ada manfaat, menghambur-hamburkan uang, tidak percaya pada pemerintah dan sebagainya (Yusri, Amrizal, & Yusriati, 2019).

Golput adalah keputusan untuk tidak memberikan hak suara dalam pemilu. Dari hasil Lembaga Survei Indonesia yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 12 Februari 2012 pada 2.050 subjek yang dipilih secara random terdapat lebih dari 50% responden berpotensi tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 dan hanya ada 49% yang sudah mantap menentukan pilihan. Hal ini sejalan dengan perolehan jumlah angka golput pada tahun 2014 di Indonesia rata-rata mencapai 30,8%. Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang memperoleh golput paling tinggi yaitu mencapai 40% dari keseluruhan pemilih terdaftar sebanyak 1,39 juta jiwa. Jumlah golput diluar pulau jawa yang cukup tinggi angka golput diatas 30% terjadi pada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau dan kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (Databoks, 2019).

Besarnya angka golput pada Pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh koordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampow beliau menyatakan bahwa ketidakpercayaan masyarakat menentukan tingginya partisipasi masyarakat, dengan demikian kandidat yang terpilih kurang mendapat pengakuan dari masyarakat. Tentu perilaku golput sangat berpengaruh pada sistem politik di Indonesia kedepannya,terkhusus pada Pemilu.

Fenomena diatas dibuktikan pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, dimana masih terdapat masyarakat yang memutuskan menjadi golput. Diketahui pada pemilu 2019 melalui Lembaga Survei Indonesia terdapat 19,24% data golput. Persentase tersebut memang terlihat lebih rendah dari angka golput pada Pemilu tahun sebelumnya, namun dari data diatas dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat masih rendah dalam menggunakan hak pilihnya ketika pemilu. Keputusan tersebut disebabkan karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga keinginan untuk memilih berkurang. Kurang percaya terhadap politik bisa jadi disebabkan karena warga kecewa terhadap sistem pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya karena tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian warga memilih untuk tidak

memberikan hak suara ketika Pemilu. Di Provinsi DIY tepatnya di Bantul, banyak warga yang secara sengaja menjadi golput. Mereka menyebut dirinya sebagai Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Yogyakarta yang mendeklarasikan diri menjadi golput pada Pilpres 2019. Mereka golput karena merasa kecewa terhadap kepemimpinan rezim Jokowi-JK yang selama menjabat sebagai kepala negara hanya memunculkan konflik yang merugikan masyarakat (Damarjati, 2019). Masih adanya masyarakat yang memilih untuk golput merupakan salah satu indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kandidat serta partai politik yang mengusungnya masih rendah.

Sekelompok mahasiswa mendeklarasikan “Milenial Golput” dengan alasan kecewa dengan kedua kubu saat pemilihan presiden tahun 2019. Dimana dari kedua kubu tidak ada yang menonjolkan rencana yang akan dilakukan kelak. Dari situlah mahasiswa menjadi bingung milih siapa saat pencoblosan nanti. Dari salah satu mahasiswa yang tergabung dalam milenial golput mengungkapkan bahwa dia tidak nyaman dengan situasi Pilpres 2019, dimana media sosial dipenuhi dengan postingan ujaran kebencian dan unggahan politis yang tidak sehat. Tidak hanya didunia maya, didunia nyata dia juga sering melihat keluarganya berdebat politis karena menyaksikan panasnya pemberitaan di medsos.

Fenomena golput tentunya berpengaruh terhadap kelancaran sistem politik di suatu negara. Seperti peristiwa Brexit yang terjadi di Inggris pada tahun 2016, dimana pada saat itu Inggris sedang melakukan referendum untuk menentukan keluar dari Uni Eropa atau tetap bertahan menjadi salah satu dari bagiannya. Pada saat itu rakyat Inggris yang berjumlah ±12,9 juta dari ±46,5 juta pemilih untuk tidak memberikan hak pilihnya dengan alasan yang sepele yaitu malas pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) karena kondisi saat itu sedang hujan. Hasil dari referendum yang dilakukan adalah Inggris memutuskan keluar dari bagian Uni Eropa dan setelah peristiwa itu Inggris mengalami kerugian besar pada pertumbuhan ekonominya. Sehingga sebagian dari pemilih yang golput mengaku menyesal karena tidak ikut menyuarakan hak pilihnya (Silitonga, 2019).

Golput bisa juga dipengaruhi oleh jenis kelamin seseorang, dimana dari jenis kelamin yang berbeda akan menimbulkan sifat atau karakteristik yang berbeda pula atau yang biasa disebut dengan jender. Jender merupakan sifat atau karakteristik yang dimiliki seseorang yang dikonstruksi secara sosiokultural. Terdapat dua jenis jender yang diakui di Indonesia, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain dilihat dari fisik, laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal perasaan, cara berfikir, perilaku maupun sikap. Menurut Williams (dalam (Walgito, 2011)). Sifat perempuan cenderung penuh kasih sayang, lemah lembut, simpati, dan sensitif. Sedangkan laki-laki cenderung suka berpetualang, agresif, berani, dan lebih bebas. selain itu menurut Baron perempuan lebih bertanggung jawab atas kesejahteraan orang lain dan tidak dapat berbuat asertif dalam berhubungan. Adanya sifat seperti yang disebutkan diatas, perempuan cenderung akan taat dan takut untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan dibanding yang laki-laki cenderung rawan untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan karena lebih berani mengambil resiko, sehingga mendorong perempuan bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian laki-laki rawan untuk menjadi golput dari pada perempuan.

Dalam memberikan keputusan untuk mejadi golput atau tidak mahasiswa menentukannya berdasarkan persepsi mereka terhadap pemerintah. Persepsi mahasiswa yang buruk terhadap pemerintah maka kemungkinan besar akan menjadi golput. Seperti halnya pada mahasiswa program studi akuntansi yang memandang pemerintah dari segi keuangan, menurut (Rohmah, 2014) dari hasil penelitiannya bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik masih rendah, sehingga akan mempengaruhi kinerja partai dan kejahatan korupsi sulit untuk dicegah. Hal tersebut mempengaruhi kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah dan mempengaruhi keyakinan dalam memberikan hak suara ketika pemilu.

Dengan adanya deklarasi golput yang dilakukan oleh mahasiswa, maka akan berdampak kepada mahasiswa yang lain. Bisa jadi banyak kalangan dari remaja akhir khususnya mahasiswa yang akan ikut dalam dukungan golput. Jika

itu terjadi tentunya akan berpengaruh dan membahayakan sistem politik serta pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut akan mengundang munculnya suatu kelompok yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan surat suara yang tidak digunakan untuk mendapat tambahan jumlah suara dengan cara mencoblos sendiri surat suara tersebut atau memanipulasi hasil perhitungan suara. Karena jika dilihat dari jumlah pemilih remaja akhir yang sangat signifikan, maka akan sangat pengaruh pada hasil perolehan suara. Terpilihnya kandidat dengan cara memanfaatkan pemilih golput akan menentukan nasib dari daerah itu sendiri. Kandidat yang terpilih ditakutkan akan lebih mementingkan kelompoknya daripada kepentingan rakyat. Dengan begitu ikut berpartisipasi dalam pemilu sangat penting dilakukan karena dari situlah peran suara masyarakat dapat menentukan jalannya sistem politik bagi negara kedepannya yang tentunya akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Selain itu perilaku golput juga akan mempengaruhi kecintaan kepada negara karena esensi dari demokrasi akan luntur sejalan dengan berjalannya waktu.

Peneliti pada penelitian ini menggunakan teori Perilaku memilih dan Kepercayaan politik.

Menurut (Surbakti, 1992) perilaku memilih adalah perilaku individu dalam menentukan keputusan untuk memilih atau tidak ketika pemilihan umum dan menentukan calon yang akan dipilih. Faktor perilaku memilih dalam psikologi merupakan cerminan karakteristik individu, ini merupakan variabel yang berpengaruh terhadap sikap politik seseorang. Dengan demikian faktor psikologi berfokus terhadap tiga aspek yaitu ikatan emosional pada partai, orientasi pada isu- isu serta orientasi pada calon (Asfar, 2006). Faktor ikatan emosional terhadap partai merupakan kesamaan respon terkait visi misi guna memenangkan serta menjunjung secara penuh kepada calon pada saat pemilu. Faktor isu yang ramai diperbincangkan merupakan keputusan untuk memilih calon yang memiliki rencana kerja dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah tersebut. Faktor orientasi kepada kandidat merupakan cara menentukan pilihan berdasarkan sifat, kepemimpinan, dan rekam jejak yang dimiliki kandidat. Kemudian perilaku

memilih dikembangkan menjadi tiga aspek yang mempengaruhi diantaranya, 1) Perasaan emosional terhadap partai, yaitu perhatian yang diberikan oleh partai politik serta kandidatnya dengan cara memberikan suatu penawaran. 2) Isu kebijakan, yaitu rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh kandidat. 3) Citra kandidat, yaitu persepsi pemilih terhadap karakteristik yang dimiliki kandidat.

Menurut (Asfar, 2006) terdapat beberapa elemen pendekatan yang menjadi fokus pada perilaku memilih, diantaranya pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. **Pendekatan Sosiologis**, yaitu pendekatan yang lebih menempatkan kegiatan memilih kedalam fenomena sosial. Keputusan seseorang dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi. Sosiologi mengarah kepada eksistensi seseorang terhadap suatu komunitas yang mempengaruhi individu dalam menentukan pilihan politik. **Pendekatan Psikologis**, yaitu pendekatan psikologi sosial yang berfungsi sebagai penjelas perilaku memilih yang mencakup identitas partai seperti visi dan misi, slogan, histori, serta partai yang mengusung. Partai yang sesuai dengan dirinya akan selalu menjadi pilihan dan susah untuk dipengaruhi. **Pendekatan Rasional** yaitu, pendekatan yang memandang hasil kakulai untung rugi sebagai alasan memilih kandidat. Dalam hal ini bukan hanya pertimbangan biaya memilih dan pengaruh suara terhadap hasil pemilu, namun juga kandidat yang menjadi pilihan. Pertimbangan untung dan rugi digunakan pemilih untuk menentukan keputusan calon yang akan dipilih dan menentukan keputusan untuk berpartisipasi atau tidak.

Menurut (Key, 1966) setiap pemilih menentukan pilihan berdasarkan hasil kerja pemerintahan selama masa jabatannya sesuai dengan harapan masyarakat atau sebaliknya. Penilaian ini dipengaruhi juga dari hasil kerja pemerintahan sebelumnya. Jika hasil kerja pemerintah pada saat itu memuaskan, maka masyarakat akan memilih kembali pemimpin tersebut, begitupun sebaliknya.

Pada saat Pemilu, keputusan untuk memilih yang rasional lebih fokus terhadap hasil pencapaian yang telah dilakukan kandidat beserta partainya.

Berdasarkan pernyataan Key diatas, dalam memutuskan pilihan berdasarkan hasil kerja yang telah dilakukan maka hal tersebut dibedakan berdasarkan tugas pokok yang telah dilakukan (Fiorina, 1981). Penilaian disini dapat dipahami sebagai turunan dari pendekatan sosial psikologis.

Terkait faktor yang mempengaruhi perilaku memilih yaitu kepercayaan masyarakat yang rendah pada politik. Kepercayaan terhadap politik sama seperti kepercayaan umumnya, namun kepercayaan politik lebih berfokus pada pembahasan yang bersangkutan dengan politik. Yaitu keyakinan seseorang kepada elemen-elemen politik yang berkuasa saat itu. Kepercayaan politik adalah inti dari teori demokrasi yang menggambarkan penilaian terhadap lembaga politik beserta elemennya sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau belum (Miller & Listhaug, 1990). Menurut (Mayer, Davis, & Schoorman, 1999) kepercayaan merupakan menyerahkan segala sesuatu kepada orang lain yang dianggap memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk menjaga aa yang telah diberikan. Contoh ada seseorang yang telah memberikan kepercayaan kepada orang lain, tetapi orang tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan karena terbukti tidak dapat dipercaya dan ini menimbulkan respon yang buruk seperti kecewa dan hilangnya rasa kepercayaan. Didalam demokrasi keyakinan adalah sebuah aspek yang penting, seperti organisasi, sistem politik, dan keluarga (Misztal, 2001). Dengan kata lain kepercayaan politik lebih berfokus pada kepercayaan yang berkaitan dengan proses psikologi dalam kasus politik.

Terdapat beberapa faktor penyebab percayaan pada politik, yaitu harapan masyarakat, keyakinan pada kinerja pemerintah, persepsi masyarakat terhadap pemerintah, dan *relative deprivation*. Harapan masyarakat, yaitu keinginan publik terhadap pemerintah untuk menanggapi, mengagresikan serta mengartikulasi keinginan dan aspirasi warga, namun apabila pemerintah tidak merespon maka menimbulkan ketidakpuasan serta kemarahan rakyat yang akan terus menjadi dan semakin memuncak sehingga muncul gerakan massa dari bermacam lapisan masyarakat, Samaloisa dalam (Matulesy & Samsul, 2013). Kepercayaan diartikan sebagai penilaian masyarakat kepada pemerintah maupun sistem politik,

apakah dapat dipercaya dan dipengaruhi atau tidak. Keyakinan pada kinerja pemerintah, yaitu individu memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa negara akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, begitu pun sebaliknya jika memiliki kepercayaan yang rendah maka akan menganggapnya lebih condong ke golongan-golongan tertentu (Mangum, 2003). Persepsi pada sistem pemerintah, yaitu pandangan masyarakat kepada elemen-elemen pemerintahan seperti sistem politik, politikus, serta institusinya. Contoh masyarakat menilai bahwa pemerintah lebih condong ke pendatang karena ada kebijakan yang dinilai menguntungkan bagi warga pendatang. *Relative deprivation*, yaitu keadaan psikologi masyarakat tidak puas dan adanya kesenjangan yang subjektif karena kondisi diri dan komunitas berbeda dengan komunitas lain (Faturachman, 2002). Kaitannya dengan kepercayaan politik adalah jika timbul perbedaan antara harapan dengan realita pada masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi rendah sehingga mempengaruhi moral, keberlangsungan dan kelancaran sistem sosial.

Menurut (Mayer, Davis, & Schoorman, 1999) kepercayaan politik memiliki beberapa aspek dimensi, yaitu *competence* atau kemampuan, *benevolence* atau kebijakan, *integrity* atau integritas, *reliability* atau keandalan, dan *fairness* atau keadilan. *Competence* adalah ketrampilan, kepiawaian, serta karakter dari calon kandidat terpilih. *Benevolence* adalah kebaikan yang menyangkut sejauh mana seorang mempercayai kandidat terpilih mempunyai watak yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok sendiri. *Integrity* yang dimaksud adalah apakah kandidat terpilih mampu mengikuti norma peraturan dan undang-undang yang ada atau tidak. *Reliability* adalah keandalan yang dimiliki oleh kandidat terpilih dalam melaksanakan pekerjaannya dan harus dibuktikan dengan perilaku. *Fairness* adalah sejauh mana masyarakat mempercayai kandidat terpilih mempunyai kebaikan, keadilan serta terbuka mengenai kebijakan yang dibuat untuk rakyat.

Keputusan seseorang dalam menentukan pilihan juga dipengaruhi juga dengan kondisi emosi orang tersebut. Tidak hanya emosi positif atau negatif, tapi

juga emosi yang lebih spesifik yaitu antusias dan kecemasan (Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, & Preston, 2004). Contoh, pemilih dengan emosi positif cenderung mewujudkan perilaku antusias yang tinggi dengan mencari tahu profil kandidat yang ada ketika Pemilu. Begitu pula yang terjadi pada pemilih yang memiliki emosi negatif atau memiliki rasa kecemasan, mereka akan mengingat pengalaman hasil kinerja pada periode sebelumnya. Seperti pemimpin yang tidak menepati janji seperti yang ditawarkan ketika kampanye, sehingga pemilih merasa khawatir dengan calon pemimpin selanjutnya akan melakukan hal yang sama. Dengan begitu akan muncul perilaku apatis yang ditunjukkan masyarakat, yaitu dengan lebih memilih menjadi golput. (Yusri, Amrizal, & Yusriati, 2019) menjelaskan ada berbagai alasan yang menyebabkan salah satunya tidak percaya pada pemerintah dan sistem politik yang ada.

Apabila seseorang mempercayai pejabat yang mewakilinya dalam parlemen, maka orang tersebut akan menyerahkan seluruh nasibnya kepada pejabat-pejabat tersebut. (Turska-Kawa, 2013). (Campbell & dkk, 1960) menunjukkan bahwa pendekatan sosial psikologi dapat menambah rasa percaya diri masyarakat pada politik. Menurutnya pendekatan ini menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh dalam melakukan perilaku memilih berdasarkan identifikasi partai tertentu yang sesuai dengan identitas politiknya, lalu persepsinya terhadap kandidat yang dipilih, kemudian yang terakhir kesesuaian isu terhadap tawaran yang diberikan oleh kandidat.

Berdasarkan faktor diatas, pendekatan sosial psikologi berpengaruh pada sikap seseorang ketika Pemilu berlangsung dan dari ketiga faktor tadi dilandasi oleh bagaimana seseorang mempunyai sebuah kepercayaan kepada politik yang ada di negaranya akan berdampak langsung pada orang tersebut. Dari ketiga faktor yang dijelaskan oleh (Campbell & dkk, 1960) adalah proses terjadinya perilaku memilih dan masing-masing aspeknya berhubungan dengan kepercayaan politik.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari (Wahyudi, et al., 2013) menjelaskan bahwa kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi berperan dalam partisipasi mahasiswa terhadap politik dengan sumbangsih kedua variabel independen sebesar 10%. Dengan kata lain kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi mempengaruhi kemauan mahasiswa dalam berpartisipasi dalam politik. Seseorang dengan tingkat kepercayaan politik tinggi akan cenderung mempunyai motivasi untuk berpartisipasi pada politik yang tinggi juga.

Dari fenomena dan kajian teori diatas, dapat diketahui bahwa kepercayaan terhadap politik sangat berpengaruh terhadap keinginan dan motivasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya dan berpartisipasi dalam politik di suatu negara. Sehingga sistem pemerintahan yang demokratis dapat terwujud.

Kajian di atas menimbulkan pertanyaan dari peneliti yang ingin diungkap, yaitu apakah ada hubungan antara kepercayaan politik terhadap perilaku memilih pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ?

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan politik terhadap perilaku memilih pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dilaksanakannya penelitian ini guna memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan masukan pada kajian ilmu psikologi politik. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta memperluas kajian ilmu mengenai perilaku memilih baik aspek dan faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, manfaat untuk segi praktis yaitu dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa tentang pentingnya memeberikan hak suara ketika pemilu berlangsung.

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara kepercayaan politik dengan perilaku memilih pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.